

**HEGEMONI DAN KONTRA-HEGEMONI DALAM RUANG REDAKSI: ANALISIS
WACANA KEBIJAKAN DESK BAHASA TEMPO TERHADAP STANDAR
JURNALISTIK**

Mikail Randu Rayyana¹, Endang Sholihatin²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat e-mail: ¹23046010005@student.upnjatim.ac.id,

Alamat e-mail: ²endang.sholihatin.ak@upnjatim.ac.id,

ABSTRACT

This study explores the strategic role of the Language Desk (Desk Bahasa) within Tempo's newsroom as an instrument of both hegemony and counter-hegemony. The central problem addressed is the inherent tension between journalists' individual writing styles and institutional standards, alongside the tendency of contemporary mass media to succumb to bureaucratic euphemisms and ambiguous political language. This research aims to deconstruct how the Language Desk's linguistic interventions function to maintain the integrity of critical journalism and the institution's linguistic sovereignty. Utilizing a qualitative methodology, the study applies Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) integrated with M.A.K. Halliday's Systemic Functional Linguistics (SFL). Primary data were gathered through a comparative text analysis of raw news drafts and finalized edited manuscripts across three distinct categories: socio-religious affairs, human-interest events, and law/corruption. The findings reveal that the Language Desk acts as an "ideological gatekeeper," exercising internal hegemony through the absolute enforcement of the institutional stylebook to eliminate redundancy and terminological inconsistencies. Simultaneously, these practices serve as a form of counter-hegemony against external narratives by rejecting euphemisms and "demystifying" elitist official state texts. Through grammatical efficiency and decisive diction, Tempo honestly reconstructs reality while positioning language as a political manifesto to safeguard public common sense. The study concludes that Tempo's strength lies not only in its reporting but in a linguistic discipline that refuses to submit to the language of power.

Keywords: *Language Desk, Hegemony, Counter-Hegemony, Critical Discourse Analysis, Tempo*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis Desk Bahasa di ruang redaksi Tempo sebagai instrumen hegemoni dan kontra-hegemoni. Masalah utama yang diangkat adalah adanya ketegangan antara gaya penulisan individu jurnalis dengan standar institusional, serta kecenderungan media massa kontemporer yang sering kali

terjebak dalam eufemisme birokrasi dan bahasa kekuasaan yang kabur. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar bagaimana intervensi linguistik Desk Bahasa bekerja dalam menjaga marwah jurnalisme kritis dan kedaulatan bahasa institusi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menerapkan pisau bedah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough yang dipadukan dengan analisis gramatikal Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) M.A.K. Halliday. Data primer diperoleh melalui teknik perbandingan teks antara draf naskah mentah jurnalis dengan naskah hasil suntingan (EDIT) dari tiga kategori berita yang berbeda: sosial-keagamaan, peristiwa kemanusiaan, dan hukum/korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desk Bahasa berfungsi sebagai "penjaga gerbang ideologi" yang menjalankan hegemoni internal melalui penegakan gaya selingkung (stylebook) secara absolut demi menghapus redundansi dan inkonsistensi terminologi. Secara bersamaan, praktik ini menjadi instrumen kontra-hegemoni terhadap narasi luar dengan menolak penghalusan makna (eufemisme) dan melakukan demistifikasi terhadap teks-teks resmi negara yang elitis. Melalui efisiensi gramatikal dan ketegasan diksi, Tempo mengonstruksi realitas secara jujur sekaligus memosisikan bahasa sebagai manifesto politik untuk menjaga akal sehat publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan Tempo tidak hanya terletak pada narasinya, tetapi pada kedisiplinan linguistik yang menolak tunduk pada bahasa penguasa.

Kata Kunci: Desk Bahasa, Hegemoni, Kontra-Hegemoni, Analisis Wacana Kritis, Tempo

A. Pendahuluan

Media massa adalah salah satu alat komunikasi yang berfungsi menyebarluaskan suatu informasi ke khalayak umum. Menurut Wilbur Schramm, media massa dapat diartikan sebagai organisasi yang mengatur dan mengelola aliran informasi dalam masyarakat dan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Sedangkan, menurut Marshall McLuhan, media massa adalah perpanjangan dari manusia itu sendiri yang dapat mengubah cara

kita berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam masyarakat. Media massa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, edukasi, dan pembentuk opini publik. Media juga berfungsi sebagai penyalur informasi yang akurat, pembentuk nilai sosial dan karakter bangsa, serta pilar demokrasi dalam meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu, media massa penting dalam menjaga integrasi nasional dan menyebarkan program pembangunan.

Dari definisi di atas, dapat diartikan berita yang dipublikasikan

dari sebuah media massa bukanlah sesuatu yang netral. Karena, media massa merupakan salah satu alat untuk membentuk opini publik. Hal ini dapat terlihat dari beberapa media massa populer di Indonesia, terutama di bidang politik, tentu ada media yang berpihak pada oposisi dan ada pula yang condong atau mendukung rezim.

Salah satunya adalah Tempo, media ini terkenal akan tradisi kebakasaannya yang kuat. Sering kali kita membaca judul dari sebuah berita yang dipublikasikan Tempo, diksi yang digunakan terkesan berani. Hal ini tidak lepas dari peran Desk Bahasa yang sangat krusial untuk menjaga kualitas konten berita. Desk Bahasa sendiri berperan sebagai penyelar bahasa agar sesuai dengan kaidah bahasa yang baik (komunikatif) dan benar (sesuai EYD). Selain itu, Desk Bahasa juga berperan dalam mencatat kosakata dan istilah baru yang berkembang di dalam pemberitaan media agar menjadi kosakata yang baku. Perannya yang lain adalah menginformasikan perubahan-perubahan penggunaan bahasa atau data kepada sesama penyelar bahasa atau redaktur. Terakhir, peran Desk Bahasa adalah memastikan tulisan wartawan

konsisten dengan gaya selingkung (karakteristik penulisan) khas Tempo yang tajam, ringkas, dan khas.

Salah satu contohnya adalah penerapan gaya selingkung. Terdapat perbedaan gaya penulisan Tempo dengan media yang lain. Contohnya dalam penggunaan kata kerja, Tempo selalu menggunakan imbuhan “me” atau “ber” di awal kata kerja, bahkan di dalam judul sekali pun, contoh penulisan judul yang salah adalah “Jaksa Agung Janji Berantas Calo”, sedangkan penulisan yang benar adalah “Jaksa Agung Berjanji Memberantas Calo”. Contoh lainnya adalah penggunaan tanda seru pada judul yang mengandung unsur interjeksi, seperti “Yuk, Berpesiar Dengan Kapal Pesiar!”, interjeksi sendiri merupakan kata yang mengungkapkan seruan perasaan.

Tempo juga memiliki aturan dalam penggunaan tanda koma. Seperti dalam sebuah kalimat yang menunjukkan perkataan atau pernyataan dari seseorang. Tanda koma tidak dipakai setelah kata “mengatakan” dan “menyatakan”, melainkan langsung diikuti dengan isi dari perkataan atau pernyataan pihak atau seseorang yang disebut. Namun, jika yang dipakai “mengungkapkan”,

barulah diikuti tanda koma sebelum isi dari pernyataan, tanda koma juga bisa diganti dengan kata “bahwa”.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, praktik penyuntingan dalam redaksi Tempo juga menjadi identitas yang dibangun melalui bahasa. Identitas ini tentunya menjadi ciri khas dari Tempo itu sendiri atau menjadi pembeda dengan media lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan pisau bedah Analisis Wacana Kritis (AWK) gagasan Norman Fairclough. Secara konseptual, penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena fokus utamanya bukan untuk mencari korelasi angka atau menguji hipotesis, melainkan untuk membongkar, menguraikan, dan memaknai suatu fenomena sosial secara alamiah di lapangan (Sugiyono, 2022). Sejalan dengan pandangan Creswell (2014), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang komprehensif atas sebuah peristiwa melalui eksplorasi teks dan realitas di baliknya. Dalam hal ini, AWK digunakan untuk memosisikan bahasa bukan sebatas medium pertukaran

informasi, melainkan sebagai arena pertarungan ideologi, instrumen kekuasaan, dan wujud nyata dari praktik sosial.

Adapun sumber data primer dalam riset ini adalah dokumen komparatif berupa perbandingan naskah berita. Data tersebut berwujud draf tulisan mentah yang baru disetorkan oleh jurnalis (sebelum melewati proses penyuntingan) dan naskah final yang telah dieksekusi oleh Desk Bahasa Tempo (sebelum dipublikasikan). Penggunaan kedua versi naskah ini merupakan syarat mutlak untuk melacak jejak intervensi redaksional dan pergeseran makna yang terjadi di ruang redaksi.

Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti menerapkan teknik observasi partisipatoris dan studi dokumen. Mengingat peneliti berstatus sebagai pemangag di lingkungan redaksi Tempo, metode observasi partisipatoris memberikan ruang bagi peneliti untuk terlibat langsung secara mendalam di dalam rutinitas kerja Desk Bahasa. Keterlibatan empiris ini—sebagaimana prinsip yang dikemukakan oleh Patton serta Sugiyono (2018)—memberikan keuntungan eksklusif bagi peneliti

untuk menangkap dinamika, budaya kerja, dan negosiasi yang sesungguhnya terjadi saat proses penggodokan naskah. Sementara itu, studi dokumen digunakan sebagai instrumen pelengkap. Langkah ini dilakukan dengan menelaah arsip tertulis berupa draf naskah tadi, sekaligus membedah stylebook (buku pedoman gaya selingkung) Tempo yang menjadi landasan otoritas para penyunting bahasa.

Lebih lanjut, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pada tahap awal, draf naskah reporter akan disandingkan dengan versi naskah pasca-suntingan Desk Bahasa. Setiap pergeseran linguistik yang ditemukan—baik berupa penyesuaian ejaan, efektivitas kalimat, maupun perubahan struktur gramatikal berlandaskan stylebook—akan dibedah terlebih dahulu menggunakan teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) dari M.A.K. Halliday, khususnya pada tataran sistem transitivity.

Setelah jejak perubahan teks pada dimensi mikro tersebut berhasil dipetakan, tahap selanjutnya adalah mengelaborasi temuan itu ke dalam analisis makro menggunakan model tiga dimensi Fairclough. Melalui pisau

analisis ini, rutinitas pemeriksaan tanda baca dan ejaan di meja Desk Bahasa tidak lagi dilihat sebagai kegiatan administratif semata, melainkan akan ditarik kesimpulannya untuk membuktikan bagaimana praktik tersebut melahirkan bentuk hegemoni internal redaksi sekaligus kontra-hegemoni terhadap wacana penguasa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pergeseran Tekstual: Kedisiplinan Gramatikal sebagai Identitas (Analisis Mikro)

Berdasarkan perbandingan antara draf naskah jurnalis dan hasil suntingan Desk Bahasa pada berita bertajuk “KPAI: Perbuatan Gus Elham Mencium Anak-anak Melanggar Undang-Undang”, ditemukan beberapa pergeseran linguistik yang menarik. Secara mikrolinguistik, Desk Bahasa Tempo melakukan pengetatan terhadap struktur kalimat yang sebelumnya dianggap “longgar” atau tidak baku.

mencium anak-anak perempuan. Video ricam juga pendakwah asal Jawa Timur itu juga kembali diunggah lantaran kontennya viral.

Gambar 1. Draft mentah naskah berita Gus Elham.

Salah satu temuan menonjol adalah perubahan pada kalimat di paragraf terakhir. Pada draf mentah,

kalimat dituliskan sebagai “Video rekam jejak pendakwah asal Jawa Timur itu juga kembali diungkit lantaran kasusnya viral.” Sedangkan, pada naskah akhir kalimat diubah menjadi “Video rekam jejak pendakwah asal Jawa Timur itu juga kembali diungkit lantaran kasusnya menjadi viral.”

menyebutkan anak-anak perempuan. Video rekam jejak pendakwah asal Jawa Timur itu juga kembali diungkit lantaran kasusnya menjadi viral.

Gambar 2. Naskah berita Gus Elham setelah dikoreksi, terdapat penambahan kata “menjadi.”

Secara teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF), penambahan kata “menjadi” mengubah struktur klausa tersebut menjadi proses relasional yang lebih lengkap secara formal. Desk Bahasa tampak menolak penggunaan kata “viral” sebagai predikat langsung yang cenderung bergaya bahasa percakapan (slang), dan memilih untuk memformalkannya. Ini menunjukkan bahwa di meja Desk Bahasa, efisiensi bahasa tetap harus tunduk pada kaidah gramatikal yang berwibawa.

Margaret menyebutkan Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang melindungi hak anak. Dari Pasal 28b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Gambar 3. Kesalahan ejaan pada kata “memilki.”

Margaret menyebutkan Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang melindungi hak anak. Dari Pasal 28b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Gambar 4. Setelah diperbaiki menjadi “memiliki” pada naskah akhir.

Selain itu, ditemukan koreksi pada aspek mekanis seperti

perubahan kata “memilki” menjadi “memiliki” serta penambahan kata tugas seperti “seperti dikutip” alih-alih hanya “dikutip”. Hal ini membuktikan bahwa Desk Bahasa berperan sebagai lapisan pertahanan terakhir yang menjamin ketelitian teks—sebuah bentuk hegemoni kebahasaan di mana kesalahan sekecil apa pun dari jurnalis harus “ditundukkan” oleh standar institusi.

“Selain itu, tindakan ini melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip hak anak,” ujar Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 13 November 2025.

Gambar 5. Kalimat tidak lengkap.

“Selain itu, tindakan ini melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip hak anak,” ujar Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 13 November 2025.

Gambar 6. Setelah dilengkapi dengan menambahkan kata “seperti.”

2. Implementasi

Gaya Selingkung dan Negosiasi Makna (Analisis Meso)

Pada dimensi ini, terlihat jelas bagaimana stylebook Tempo bekerja sebagai instrumen kekuasaan di ruang redaksi. Salah satu aturan yang ditaati secara konsisten adalah penggunaan tanda baca pada kalimat atribusi.

Dalam teks tersebut, kutipan dari Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah disajikan tanpa menggunakan tanda koma setelah kata mengatakan, sesuai dengan kebijakan unik Tempo, yakni

"Margaret mengatakan perbuatan Gus Elham itu berpotensi dijerat dengan Pasal 76E..."

Margaret mengatakan perbuatan Gus Elham itu berpotensi dijerat dengan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, memaksa, atau melakukan perbuatan cabul (*indecent act*) terhadap anak. "KPAI perlu

Gambar 7. Tidak ada koma setelah "mengatakan."

Perlakuan ini berbeda ketika redaksi menggunakan kata tuturnya atau ujarannya yang tetap menggunakan koma sebagai jeda. Praktik ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk internalisasi ideologi kebahasaan Tempo. Jurnalis "dipaksa" meninggalkan kebiasaan umum (di mana banyak media lain menggunakan koma setelah kata mengatakan) untuk mengikuti identitas kolektif Tempo. Di sini, terjadi proses produksi teks yang termediiasi oleh kepentingan institusional untuk terlihat beda, ringkas, dan kuat.

3. Bahasa sebagai Alat Kontra-Hegemoni terhadap Narasi Sosial (Analisis Makro)

Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, kebijakan Desk Bahasa dalam mempertahankan pilihan diksi yang "tajam" dan "berani" menunjukkan fungsi kontra-hegemoni. Dalam kasus Gus Elham, naskah akhir tetap mempertahankan diksi yang lugas seperti "perbuatan

cabul" dan "melanggar undang-undang".

Desk Bahasa tidak mencoba memperhalus (eufemisme) tindakan tersebut meski subjek yang dibahas adalah seorang tokoh pendakwah (Gus). Biasanya, dalam narasi sosial tertentu, terdapat kecenderungan untuk memperhalus istilah bagi tokoh agama guna menjaga sensitivitas publik. Namun, melalui kebijakan bahasanya, Tempo melakukan perlawanan terhadap hegemoni tersebut. Dengan tetap menggunakan istilah hukum yang tegas, Tempo menegaskan posisinya sebagai pengawas sosial yang independen.

Intervensi Desk Bahasa melalui penambahan tanda baca koma pada kalimat-kalimat penjelasan juga membantu mempertegas posisi korban dan kesalahan pelaku, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tanpa bias yang kabur. Pada titik inilah, kebijakan bahasa Tempo bukan lagi sekadar urusan subjek-predikat, melainkan sebuah sikap politik dalam membela hak anak dan melawan normalisasi kekerasan seksual.

4. Kedisiplinan Linguistik: Efisiensi dan Ketepatan Diksi (Analisis Mikro)

Melalui perbandingan antara naskah mentah dan naskah hasil suntingan pada berita "Pendaki Hilang di Lereng Gunung Lawu Ditemukan Meninggal", ditemukan kecenderungan Desk Bahasa untuk melakukan "pembersihan" teks demi mencapai efisiensi tanpa mengurangi bobot informasi.

Mongkrang, lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan pada Selasa, 10 Februari 2026, dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di atas

Gambar 8. Terdapat kata "akhirnya" sebelum "ditemukan" dan kata "dunia" setelah "meninggal."

Salah satu temuan yang konsisten dengan teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) Halliday adalah penyederhanaan kelompok verba dan nomina. Pada draf mentah, kalimat ditulis sebagai "...ditemukan pada Selasa, 10 Februari 2026, dalam kondisi meninggal dunia." Sedangkan, pada naskah akhir diubah menjadi "...ditemukan pada Selasa, 10 Februari 2026, dalam kondisi meninggal."

dinyatakan hilang di Bukit Mongkrang, lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan pada Selasa, 10 Februari 2026, dalam kondisi meninggal dunia.

Gambar 9. Kata "akhirnya" dan "dunia" dihilangkan.

Secara semantik, penambahan kata "dunia" dianggap sebagai redundansi (kelebihan informasi) oleh Desk Bahasa Tempo. Dengan memangkasnya menjadi "meninggal", teks menjadi lebih padat dan lugas. Selain itu, terdapat perubahan struktur

pada subjek di awal paragraf. Pada draf mentah, kalimat ditulis sebagai "PENDAKI, Yasid Ahmad Firdaus, 26 tahun, yang sempat dinyatakan hilang...". Sedangkan, pada naskah akhir, diubah menjadi "YASID Ahmad Firdaus, 26 tahun, pendaki yang sebelumnya dinyatakan hilang...".

PENDAKI, Yasid Ahmad Firdaus, 26 tahun, yang sempat dinyatakan hilang di Bukit Mongkrang, lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan

Gambar 10. Struktur kalimat sebelum diubah, terdapat kata "pendaki" berada di awal kalimat.

Desk Bahasa mengubah posisi kata "pendaki" dan menggunakan huruf kapital pada nama subjek (YASID). Secara mikrolinguistik, ini adalah upaya untuk menonjolkan aktor dalam sebuah peristiwa (identifikasi partisipan). Penggunaan kata "sebelumnya" alih-alih "sempat" juga menunjukkan upaya presisi dalam menggambarkan urutan waktu (sirkumstansi waktu), memberikan kesan bahwa status "hilang" tersebut adalah fakta historis yang telah selesai.

PENDAKI—Yasid YASID Ahmad Firdaus, 26 tahun, pendaki yang sempat sebelumnya dinyatakan hilang di Bukit Mongkrang, lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa

Gambar 11. Kata "Pendaki" di awal kalimat dipindahkan dan diganti dengan nama subjek "Yasid."

5. Mekanisme Hegemoni: Otoritas Gaya Selingkung (Analisis Meso)

Pada dimensi meso, hegemoni Desk Bahasa terlihat sangat kuat dalam penerapan tata tulis yang

bersifat institusional. Salah satu ciri khas "Hegemoni Tempo" yang ditemukan dalam dokumen ini adalah pilihan konjungsi dan perluasan akronim. Contohnya, pada frasa "...namun tidak membuahkan hasil." Pada naskah akhir diubah menjadi "...tapi tidak membuahkan hasil."

Operasi pencarian resmi dilakukan selama tujuh hari, mulai 19 hingga 25 Januari 2026, dan sempat diperpanjang beberapa kali, namun ~~tapi~~ tidak membuahkan hasil. Tim pencarian dan

Gambar 12. Konjungsi "namun" diganti "tapi", salah satu ciri khas hegemoni Tempo.

Tempo dikenal memiliki kecenderungan menggunakan konjungsi "tapi" alih-alih "namun" dalam banyak konteks untuk menjaga ritme tulisan agar terasa lebih bercerita (storytelling) dan tidak terlalu kaku seperti bahasa hukum atau birokrasi. Meskipun secara formal "namun" sering dianggap lebih baku dalam bahasa Indonesia ragam tulis, Desk Bahasa menerapkan hegemoni gaya selingkungnya sendiri yang mengutamakan kelenturan bahasa.

Selain itu, terdapat kebijakan "pemanjangan" istilah pada penyebutan pertama. Pada draf mentah, kalimat dituliskan sebagai "...melibatkan Basarnas, BPBD, relawan pecinta alam, TNI-Polri...". Sedangkan, pada naskah akhir diubah menjadi "...melibatkan Badan Pencarian dan Pertolongan

(Basarnas), BPBD, relawan pecinta alam, Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian RI..."

Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), BPBD, relawan ~~pecinta~~ ~~pecinta~~ alam, TNI-Polri Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian RI, serta tim dengan keahlian teknik vertikal dikerahkan.

Gambar 13. Salah satu bentuk dari kebijakan pemanjangan, nama organisasi yang diikuti singkatannya.

Intervensi ini menunjukkan otoritas Desk Bahasa dalam memastikan bahwa teks harus tetap edukatif dan formal. Jurnalis mungkin terbiasa dengan akronim singkat karena tuntutan kecepatan, namun Desk Bahasa "menundukkan" naskah tersebut agar patuh pada standar kualitas Tempo yang mengharuskan penyebutan nama lembaga secara lengkap pada referensi pertama.

6. Bahasa sebagai Representasi Realitas yang Objektif (Analisis Makro)

Secara makro, analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan Desk Bahasa berfungsi untuk menjaga objektivitas dan integritas informasi sebagai bentuk kontra-hegemoni terhadap jurnalisme yang terburu-buru.

Perubahan-perubahan kecil seperti mengoreksi "sesudah" menjadi "setelah" atau "pecinta" (dengan huruf 'n') alih-alih "pecinta", mencerminkan ideologi bahwa media harus menjadi penjaga gawang

kebahasaan di tengah gempuran bahasa populer yang tidak keruan.

Dalam teks ini, Desk Bahasa juga menghapus keterangan yang dianggap spekulatif atau tidak perlu, seperti mengubah "berhasil diturunkan" menjadi "dapat diturunkan". Penggunaan kata "berhasil" sering kali dianggap mengandung unsur opini atau emosi (proses mental/afektif), sedangkan "dapat" lebih bersifat faktual (proses material). Dengan kebijakan penyuntingan yang ketat ini, Tempo membangun wacana bahwa mereka adalah media yang sangat berhati-hati, dingin dalam menyajikan data, namun tajam dalam pilihan kata—sebuah identitas yang membedakan mereka dari media daring kebanyakan yang sering kali abai terhadap detail linguistik demi mengejar klik (clickbait).

7. Demistifikasi Bahasa Birokrasi:

Presisi dan Konsistensi Terminologi Hukum

Data perbandingan ketiga, yang bersumber dari naskah berita bertajuk "Korupsi Pengolahan Karet di Kementan, KPK Periksa Dua Saksi", membuka tabir bagaimana Desk Bahasa Tempo berhadapan dengan teks yang sarat akan jargon

birokrasi dan hukum. Rilis resmi atau pernyataan dari aparat penegak hukum sering kali kaku, berbelit, dan dipenuhi singkatan. Di sinilah Desk Bahasa mengambil peran sentral untuk melakukan demistifikasi (penyederhanaan tanpa mengurangi esensi) agar teks tersebut lebih mudah dicerna oleh pembaca, sekaligus menundukkannya pada otoritas tata bahasa Tempo.

A. Analisis Mikro: Pemangkasan Redundansi Gramatikal

Secara mikrolinguistik (LSF Halliday), ditemukan pola penghilangan elemen sirkumstansi dan preposisi yang dianggap memberatkan ritme kalimat.

Dugaan korupsi terjadi saat Kementerian Pertanian dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo. Pada 2 Desember 2024, KPK menyatakan telah menetapkan satu tersangka. Pada 21 Oktober 2025, KPK menggunakan ASN bernama Yudi Wahyudi (YW) merupakan tersangka kasus tersebut.

Gambar 14. Terdapat preposisi "oleh" setelah kata "pemimpin."

Pada draf mentah, terdapat kalimat yang ditulis sebagai "...Dugaan korupsi terjadi saat Kementerian Pertanian dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo." Kemudian, pada naskah akhir diubah menjadi "...Dugaan korupsi terjadi saat Kementerian Pertanian dipimpin Syahrul Yasin Limpo."

Dugaan korupsi terjadi saat Kementerian Pertanian dipimpin Syahrul Yasin Limpo. Pada 2 Desember 2024, KPK menyatakan telah menetapkan satu tersangka. Pada 21 Oktober 2025, KPK menggunakan seorang gagal sebagai (ASN) bernama Yudi Wahyudi (YW) menjadi tersebut kasus tersebut.

Gambar 15. Preposisi "oleh" dihapus.

Penghapusan preposisi "oleh" pada kalimat pasif di atas menunjukkan watak bahasa Tempo yang mengejar efisiensi maksimal. Secara gramatikal, kalimat pasif bahasa Indonesia memang sah berdiri tanpa "oleh" jika langsung diikuti agen (pelaku). Desk Bahasa Tempo secara sadar memangkas kata tugas yang tidak menambah nilai informasi baru demi menciptakan tuturan yang lebih padat.

Desember 2024, KPK menyatakan telah menangkap satu tersangka. Pada 21 Oktober 2025, KPK mengumumkan ASN bernama Yudi Wahyudi (YW) merupakan tersangka kasus tersebut.

Gambar 16. Di dalam kalimat terdapat verba relasional atributif statis, yakni "merupakan."

Selain itu, terdapat pergeseran bentuk verba relasional, pada draf mentah terdapat kalimat yang ditulis sebagai "KPK mengumumkan ASN bernama Yudi Wahyudi (YW) merupakan tersangka..." Kemudian, pada naskah akhir diubah menjadi "KPK mengumumkan aparat sipil negara (ASN) bernama Yudi Wahyudi (YW) menjadi tersangka..."

Desember 2024, KPK menyatakan telah menangkap satu tersangka. Pada 21 Oktober 2025, KPK mengumumkan aparat sipil negara (ASN) bernama Yudi Wahyudi (YW) menjadi tersangka kasus tersebut.

Gambar 17. Diganti dengan proses material/perubahan wujud dinamis, yakni "merupakan" diganti "menjadi."

Penggantian kata "merupakan" (verba relasional atributif yang statis) menjadi "menjadi" (proses material/perubahan wujud yang lebih dinamis) memberikan efek transisi

status hukum yang lebih tegas di mata pembaca.

B. Analisis Meso: Otoritas Ejaan dan Penataan Ulang Identitas Birokrasi

Pada dimensi praktik wacana, otoritas stylebook Tempo kembali ditegakkan secara absolut, terutama terkait aturan kapitalisasi dan atribusi nama.

"Peryidik mendalami soal proses pengadaan barang format tahun 2021," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.
Dua anggota Pokja yang diperiksa, yaitu sekretaris yang merangkap anggota Pokja Perubahan 2021 Hendri Y. Rahman serta Ketua merangkap anggota Pokja Perubahan 2021 Rony Maharani. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi di kasus ini.

Gambar 18. "Pokja" dan "Juru Bicara" ditulis dengan huruf kapital.

Pada draf mentah, terdapat kalimat yang ditulis sebagai "Dua anggota Pokja yang diperiksa..." dan "ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo..." Kemudian, pada naskah akhir diubah menjadi "Dua anggota pokja yang diperiksa..." dan "ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo,..."

"Peryidik mendalami soal proses pengadaan barang format tahun 2021," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.
Dua anggota pokja yang diperiksa, yaitu sekretaris merangkap anggota pokja perubahan 2021, Hendri Y. Rahman, serta ketua merangkap anggota pokja, Rony Maharani. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus ini.

Gambar 19. "pokja" dan "juru bicara" ditulis dengan huruf kecil, serta ditambahkan koma setelah "KPK."

Jurnalis sering kali terbawa kebiasaan birokrasi yang gemar memberikan huruf kapital pada jabatan atau divisi (Pokja, Juru Bicara). Namun, Desk Bahasa Tempo melakukan "koreksi ideologis" dengan menurunkannya menjadi huruf kecil

(lower case) karena kata-kata tersebut bukanlah nama diri. Lebih jauh, penambahan tanda koma untuk mengapit nama ("...", Budi Prasetyo,...") menunjukkan ketertiban aposisi—aturan tata tulis yang sangat khas dipertahankan oleh Tempo agar struktur subjek tidak rancu.

Tempo juga menerapkan kedisiplinan yang ketat pada penggunaan akronim aparatur negara. Jika jurnalis awalnya mencampuradukkan sebutan "ASN" dan "PNS" pada draf mentah, naskah akhir menyapu bersih ketidakkonsistenan tersebut. Desk Bahasa mewajibkan pemanjangan istilah pada penyebutan pertama "aparatur sipil negara (ASN)", untuk kemudian menyeragamkan seluruh kata "PNS" di tubuh berita menjadi "ASN".

C. Analisis Makro: Jurnalisme yang Tidak Tunduk pada Teks Resmi

Secara makro (AWK Fairclough), praktik penyuntingan berita hukum ini adalah manifestasi dari independensi media. Sering kali, media daring terjebak pada jurnalisme copy-paste, di mana siaran pers dari lembaga negara seperti KPK ditelan

mentah-mentah berikut dengan kerancuan bahasanya.

Melalui meja Desk Bahasa, Tempo menolak praktik tersebut. Mereka membuktikan bahwa institusi pers tidak boleh tunduk pada diksi birokrasi negara. Dengan merapikan tata bahasa, menyeragamkan akronim, dan melucuti huruf kapital yang berlebihan dari lembaga pemerintahan, Tempo secara halus melakukan dekonstruksi (kontra-hegemoni) terhadap "kebesaran" bahasa birokrasi. Mereka mengembalikan teks hukum yang semula elitis dan kaku menjadi produk jurnalistik yang lugas, setara dengan pembacanya, dan sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas keredaksian Tempo.

E. Kesimpulan

Melalui analisis mendalam menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dan Linguistik Sistemik Fungsional M.A.K. Halliday, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa bahasa di ruang redaksi Tempo bukanlah sekadar medium penyampai pesan yang netral. Sebaliknya, setiap titik, koma, dan pilihan imbuhan yang diputuskan di meja Desk Bahasa adalah sebuah

praktik ideologis yang disengaja untuk membangun otoritas sekaligus melakukan perlawanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni internal terjadi secara konsisten melalui pemberlakuan "gaya selingkung" yang ketat. Di dalam ruang redaksi, Desk Bahasa memegang otoritas penuh untuk menundukkan draf mentah jurnalis agar patuh pada identitas kolektif institusi. Temuan pada serangkaian naskah—mulai dari kasus Gus Elham, pendaki Gunung Lawu, hingga pengusutan korupsi Kementan—memperlihatkan bagaimana Desk Bahasa melakukan pembersihan teks secara total. Pembersihan ini tidak hanya menyasar bahasa percakapan yang tidak baku dan redundansi informasi, tetapi juga secara tegas menertibkan ketidakkonsistenan istilah (seperti kesimpangsiuran pemakaian singkatan ASN dan PNS) serta membatalkan kapitalisasi jabatan yang berlebihan (seperti penulisan pokja dan juru bicara). Hal ini dilakukan demi mencapai efisiensi dan ketajaman—sebuah standar "Hegemoni Tempo" yang menempatkan estetika dan kedisiplinan tata tulis di atas

kebiasaan linguistik jurnalis pada umumnya.

Di sisi lain, praktik linguistik ini sekaligus menjadi instrumen kontra-hegemoni yang tajam terhadap dominasi narasi dari luar. Dengan menolak eufemisme (penghalusan makna) dan mempertahankan diksi hukum yang lugas, Tempo secara aktif melawan upaya penjinakan wacana. Lebih jauh lagi, wujud kontra-hegemoni ini paling kentara ketika Tempo berhadapan dengan teks resmi dari lembaga kekuasaan negara. Alih-alih melakukan copy-paste dan tunduk pada gaya bahasa birokrasi pemerintahan yang kerap kaku dan berbelit, Desk Bahasa berani melakukan "demistifikasi" teks. Mereka meruntuhkan kebesaran teks rilis aparat dengan memangkas kata tugas yang memberatkan kalimat dan mengganti verba statis menjadi lebih dinamis. Pilihan gramatikal yang berani ini merupakan bentuk perlawanan terhadap bahasa birokrasi yang cenderung kabur, pasif, dan elitis.

Pada akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa peran Desk Bahasa di Tempo melampaui tugas administratif seorang penyelaras bahasa. Mereka adalah "penjaga

gerbang ideologi" yang memastikan bahwa bahasa media tetap menjadi pilar demokrasi yang kritis dan setara dengan pembacanya. Proses penyuntingan teks di Tempo pada akhirnya adalah sebuah manifesto: bahwa untuk menjaga independensi jurnalisme, sebuah media harus terlebih dahulu memiliki kedaulatan penuh atas bahasanya sendiri, bahkan ketika dihadapkan pada teks resmi milik negara sekalipun.

Bagi praktisi jurnalisme, penelitian ini mengingatkan pentingnya memiliki pedoman gaya selingkung yang kuat sebagai jati diri media di tengah hiruk-pikuk informasi digital yang sering kali mengabaikan kaidah bahasa dan hanya membebek pada rilis resmi instansi. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan menyertakan aspek wawancara mendalam kepada para redaktur bahasa, guna menggali dinamika dan tarik-ulur negosiasi di balik meja redaksi yang sering kali tidak terekam di atas naskah tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, M., Dwi Surwati, C. H., & Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. (2025). ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH: REPRESENTASI KEKERASAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DALAM SERIAL BABY REINDEER. In *Jurnal Komunikasi Massa* (Vol. 18, Issue 2, pp. 33–42) [Journal-article]. <https://jurnal.uns.ac.id/kom/>
- Alaudin, G., Widjanarko, W., & Nana Sutikna. (2026). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Pemberitaan Isu Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Soedirman Dalam Detik.com. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 32–32(1), 234–242.
- ANALISIS WACANA KRITIS MODEL NORMAN FAIRCLOUGH DALAM BERITA KOMPAS. (2025). In *LINGUISTIK : Jurnal Bahasa & Sastra* (Vol. 10, Issue 4, pp. 497–504) [Journal-article]. UM-Tapsel Press. <https://doi.org/10.31604/linguistik.v10iv4>
- Anggria, F. & Universitas Negeri Medan. (2025). KEKUASAAN DAN KONFLIK IDEOLOGI DALAM FILM KUPU-KUPU KERTAS: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH. In *JURNAL BASTRA* (Issue No.1, pp. 198–207). <https://bastra.uho.ac.id/index.php/journal>
- Arthawati, S. N., Mevlanillah, S. A. R., Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, & Universitas Terbuka. (2023). PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN PENGELOLAAN

- KAMPUNG KB UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA BALE KENCANA KECAMATAN MANCAK. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Vol. Vol.2* (Issue No.10). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Dosen Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia FKIP UMKO, Masitoh, & Universitas Muhammadiyah Kotabumi. (2020). *PENDEKATAN DALAM ANALISIS WACANA KRITIS* (Vol. 18, Issue 1, pp. 64–68) [Journal-article].
- Fitri, N., Artawa, K., Satyawati, M. S., & Sawirman, S. (2021). Transitivitas dalam Teks Peradilan Indonesia: Kajian Linguistik Fungsional Sistemik. *DIGLOSLIA Jurnal Kajian Bahasa Sastra Dan Pengajarannya*, 4(2), 139–148. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i2.116>
- Ilma, C., Liliani, E., & Efendi, A. (2026). Strategi Linguistik dan Praktik Sosial dalam Iklan Pinjaman Online: Studi Wacana Kritis Norman Fairclough. *Bahasa Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(3), 807–823. <https://doi.org/10.26499/bahasa.v7i3.1653>
- Kartikawati, M., & Indrawati, D. (2012). Analisis Wacana Iklan pada Instagram : Teori Norman Fairclough [Journal-article]. *Nama Jurnal*, 01–01, 0–21.
- Kinasih, A. T., NIM. 10204244009. (2016). Analisis Wacana Berita Hilangnya Maddie dalam Situs www.lefigaro.fr (Pendekatan Mikro dan Makrostruktural) [Thesis]. In *Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Amin, A. M. R. L. (2023). ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH TERHADAP KONSEP PLURALISME DALAM WEBSITE NU ONLINE. In *SKRIPSI*.
- KAWENDO, W., Magdalena Ngongo, & Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. (2021). ANALISIS TRANSTIVITAS PADA TEKS KETTE KATONGA WERI KAWENDO (TKKWK). In *Universitas Kristen Artha Wacana Kupang*[Journal-article].
- Marlia, M. (2008). MAKNA IDEASIONAL PADA TEKS KASUS SOEHARTO OLEH PIHAK PRO DAN KONTRA (KAJIAN MELALUI SISTEM TRANSITIVITAS). *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 20(2), 131–140. <https://doi.org/10.23917/cls.v20i2.4962>
- Megawati, E. (2021). ANALISIS WACANA KRITIS MODEL FAIRCLOUGH DAN WODAK PADA PIDATO PRABOWO (Critical Discourse Analysis of Fairclough' and Wodak's Model within Prabowo's Speech). *Kandai*, 17(1), 75. <https://doi.org/10.26499/jk.v17i1.1551>
- Noviyanti, S., Ansoriyah, S., Tajuddin, S., & Linguistik Terapan, Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta. (2018). SISTEM TRANSITIVITAS PADA DIKSI NOVEL RASA KARYA TERE LIYE. In *Linguistik Terapan*,

- Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta.
- Padilah, A. F., Hamdani, A., & Sekolah Pascasarjana Institut Pendidikan Indonesia. (2023). ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRLOUGH PADA BERITA GEGARA BANDEL STUDY TOUR SMAN 6 DEPOK BERUJUNG DIAUDIT PEMPROV. In *Sekolah Pascasarjana Institut Pendidikan Indonesia* [Journal-article].
- Rahayu, A. T. & Fakultas Sastra dan Pendidikan, Universitas Teknokrat Indonesia. (n.d.). PEMAHAMAN FAIRCLOUGH TENTANG CDA.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Qualitative Research in Education: Understanding the basics. In *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* (Vol. 3, Issue 2, pp. 9680–9694) [Journal-article]. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Saraswati, A., & Sartini, N. W. (2017). Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. In Universitas Airlangga, *Mozaik Humaniora: Vol. Vol. 17* (2) (pp. 181–191) [Journal-article].
- Subiyakti, E. T., & Asrofah, A. (2025). Kecurangan UTBK dalam Bingkai Media: Analisi Wacana Kritis Model Nurman Fairclough pada Pemberitaan Online CNN Indonesia. *J-LELC Journal of Language Education Linguistics and Culture*, 5(3), 301–310.
- <https://doi.org/10.25299/j-lelc.2025.22659>
- Tahlia, A. I., Abrian, R., & UIN Sunan Ampel Surabaya. (2023). Musik sebagai kritik sosial. In *An-Nas: Jurnal Humaniora* (Vol. 7, Issue 2, pp. 178–180) [Journal-article].
- Waruwu, M. & Universitas Kristen Satya Wacana. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). In *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Vols. 7–7, Issue 1, pp. 2896–2910).
- Wulan, E. P. S., Thyrhaya, T. T., Saragih, R. B., UHN, & USU. (2025). Transivitas dan Konteks Situasi Pidato. In *Transivitas Dan Konteks Situasi Pidato* (pp. 168–169) [Journal-article].
- Wulan Sari, P., 1*, Setyonegoro, A., Priyanto, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, & Universitas Jambi. (2025). Analisis wacana kritis Norman Fairclough pada pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia di media Antaranews.com. *ISOLEK: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Bahasa, Dan Sastra*, 3(1), 1–14.